

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemilihan umum adalah sebagai sarana demokrasi yang telah digunakan sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan dapat diakomodasi dengan baik. Pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak serta mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara<sup>1</sup>.

Menurut William J. Goode, “sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ<sup>2</sup>.

Pertama kali sosialisasi akan terjadi dalam lingkungan keluarga, keluarga yang akan berperan sebagai agen sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu untuk mempersiapkan menjadi anggota masyarakat. Keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai dan norma-norma. Pada lingkungan keluarga orang tua memiliki peran yang strategis untuk memberikan nilai-nilai sosial maupun keagamaan sehingga nilai-nilai tersebut dapat ditanam ke dalam jiwa anak (remaja). Kebiasaan orang tua dalam bertindak dan menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari menjadi suri tauladan untuk anak mengikutinya.

---

<sup>1</sup>Ihromi, T.O. *Bunga Rampa ; Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm 113

<sup>2</sup>William J. Goode. *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm 20

Politik menurut pandangan klasik Aristoteles adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Politik dilihat sebagai usaha yang ditempuh warga negara baik itu membicarakan ataupun menyelenggarakan hal ihwal untuk mewujudkan kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat, politik dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat<sup>3</sup>.

Partisipasi politik datang dari setiap warganegara yang mempunyai hak untuk memilih ataupun untuk dipilih. Warganegara yang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu ialah warganegara yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah/pernah kawin. Warganegara yang berusia 17 tahun dikatakan sebagai remaja yang memiliki pengetahuan sangat minim mengenai politik. Maka ada istilah untuk remaja yang baru berusia 17 tahun dalam turut serta berpartisipasi dalam pemilu, biasanya remaja ini sebut sebagai pemilih pemula atau orang yang baru turut serta berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan umum. Dengan pemilihan umum tersebut, rakyat Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penentu dalam sebuah tatanan negara demokrasi

---

<sup>3</sup>Ihromi, T.O. *loc.cit*

sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan suara secara langsung.

Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun atau yang belum berusia 17-21 tahun tetapi sudah atau pernah menikah dan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum, yang telah memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Secara politis pemilih pemula memang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih yang lain, tetapi ini merupakan sebuah penggambaran bagaimana partisipasi mereka kedepannya, walaupun secara politis suara dari pemilih pemula tidak dapat mempengaruhi hasil perolehan akhir suara, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik juga memerlukan suara mereka untuk menambah perolehan suara yang telah ada, sebab tujuan dari partai politik dalam sebuah pemilihan adalah bagaimana untuk dapat memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan tersebut<sup>4</sup>.

Dalam pemilihan umum terdapat pihak-pihak yang terlibat dalamnya atau yang biasa kita sebut agen sosialisasi. Agen sosialisasi seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, lingkungan kerja, media massa. Dilihat dari semua aspek keluarga merupakan pihak terdekat yang dapat berinteraksi langsung dan merupakan pihak yang membantu individu mendapatkan pelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>4</sup> Miriam, Budiarjdo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm 466

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, lembaga pendidikan inilah yang pertama ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan pertama kali adalah dalam keluarga.

Dalam menumbuhkan kesadaran politik terhadap pemilih pemula orang tua sangat diperlukan dikarenakan orang tua merupakan langkah awal dalam semua pengetahuan yang didapatkan oleh pemilih pemula sejak dini. Orang tua memberikan pengertian dan arahan kepada anak tentang tingkah laku sosial dan perannya sebagai individu yang berperan penting di dalam perkembangan negara. Orang tua memberikan pengertian dan arahan kepada remaja tentang kesadaran politik sehingga unsur-unsur tentang kesadaran politik dapat disampaikan secara mudah dan jelas<sup>5</sup>.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Idham dari fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar (Studi Pada Siswa SMA Negeri 21 Makassar) Tahun 2018 “. .

Kesimpulan dari penelitian itu adalah bahwa faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah adalah mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka daripada ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi adanya pertimbangan dari pihak keluarga, Falsafah ketimuran bagi masyarakat di kota Makassar masih dijunjung dengan teguh. Mereka masih mementingkan keluarga di atas kepentingan yang lain. Jadi ketika anggota keluarga yang lain tidak setuju dengan suatu aktifitas yang kita lakukan, maka lebih baik berhenti melakukannya. Demikian juga dengan aktifitas politik pemilih pemula dalam pemilihan

---

<sup>5</sup>A. Rahman H.I. *sistem Politik Indonesia*, (yogyakarta : Graha Ilmu 2007), hlm 245

walikota di kota Makassar tahun 2018, ketika anggota keluarga ada yang melarang maka mereka akan segeramematuhinya<sup>6</sup>.

Penelitian lainnya oleh M.Teguh Wibowo, Efendi Hasan yang berjudul ” Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh) Tahun 2104”

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu sosialisasi politik di lingkungan keluarga tidak berjalan lancar sepenuhnya karena pemahaman tentang politik yang minim, tidak seringnya terjadi diskusi politik dalam keluarga dan juga kurangnya minat politik terhadap pemilih pemula. Hal ini disebabkan karena ketidakpercayaan mereka terhadap elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja<sup>7</sup>.

Berbeda dalam penelitian sebelumnya peneliti mempunyai pendapat yang lain, dimana peneliti mengkhususkan untuk meneliti bagaimana pengaruh sosialisasi oleh keluarga sebagai perantara proses penyerapan nilai-nilai politik kepada pemilih pemula. Keluarga dipilih dalam penelitian ini karena observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Bangko mendapatkan hasil bahwa sebagian besar pemilih pemula di kecamatan tersebut lebih sering membicarakan mengenai pemilihan dengan keluarga dibandingkan dengan teman sebayanya, karena pembicaraan yang dilakukan pemilih pemula dengan teman sebayanya lebih kepada hal-hal yang menarik mengenai dunia remaja mereka.

Selain hasil observasi tersebut, keluarga sebagai agen pendidik pertama dan utama yang didapat oleh individu merupakan alasan dipilihnya keluarga dalam penelitian ini. Jiwa remaja yang terdapat dalam pemilih pemula dengan rasa ingin

---

<sup>6</sup>Idham ,*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar (Studi Pada Siswa SMA Negeri 21 Makassar) Tahun 2018*, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, diakses pada 10 desember 2019.

<sup>7</sup>M.Teguh Wibowo, Efendi Hasan, *Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh) Tahun 2104*, jurnal ilmiah fisip unsyiah, Vol.2.no 2, mei 2017 diakses pada 10 desember 2019.

tahu serta ingin mencoba yang begitu besar sedangkan informasi dan pengalaman yang masih sedikit karena merupakan pengalaman pertama untuk menggunakan hak suaranya adalah alasan mengapa dipilih pemilih pemula dalam penelitian. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebelumnya terhadap pemilih pemula di Kecamatan Bangko mayoritas mereka menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena adanya pengaruh keluarga yang besar, sebelum menggunakan hak pilihnya mereka terlebih dahulu bertanya pada orang tuanya, karena pemilih pemula belum mengerti politik sehingga pilihannya mengikuti pilihan orang tuanya, karena orang tua dianggap lebih mengetahui.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Rindah (18 tahun) Desa Kungkai ia menyatakan *sosialisasi diperoleh televisi, dari keluarga, tetangga, kadang dari teman juga, tapi lebih banyak dapat informasi dari keluarga saya*<sup>8</sup>.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Iing Pranata (18 tahun) Desa Kungkai ia menyatakan *bahwa orang tua setidaknya harus memberikan gambaran kepada anaknya mengenai pemilihan yang akan berlangsung, karena anaknya baru pertama kali memilih*<sup>9</sup>.

Berikut Data Pemilih Tetap (DPT) beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi diantaranya :

1. Kabupaten Batanghari 192.629 orang.
2. Kabupaten Bungo 239.772 orang.
3. Kabupaten Kerinci 210.804 orang.
4. Kabupaten Merangin 261.155 orang.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Rindah, tanggal 7 Maret 2019 di Desa Kungkai.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Iing Pranata, tanggal 2 April 2019 di Desa Kungkai.

5. Kabupaten Muaro Jambi 270.228 orang.
6. Kabupaten Sarolangun 197.433 orang.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 216.362 orang.
8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 168.575 orang.
9. Kabupaten Tebo 227.142 orang.
10. Kabupaten Kota Jambi 396.082 orang.
11. Kabupaten Sungai Penuh 64.432 orang.

Dari 11 kabupaten diatas didapatkan keterangan bahwa jumlah DPT terbesar terdapat pada kabupaten/kota Jambi dengan jumlah DPT 396.082 orang dan jumlah DPT terkecil terdapat pada kabupaten Sungai Penuh dengan jumlah DPT 64.432 orang. Di bawah ini terlihat data penduduk Kabupaten Merangin Menurut Kecamatan yang menjadikan penulis memilih Kecamatan Bangko sebagai objek penelitian .

**Tabel 1.1 Data Pemilih Pemula Berdasarkan Kecamatan  
Kabupaten Merangin Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH PEMULA</b>	<b>TOTAL DAFTAR PEMILIH TETAP</b>
1.	Bangko	3.342	32.989
2.	Bangko Barat	881	8.160
3.	BatangMasumai	858	7.581
4.	Jangkat	868	7.918
5.	JangkatTimur	920	7.055

6.	Lembah Masurai	1.211	10.127
7.	Margo Tabir	3.208	10.248
8.	Muara Siau	758	7.544
9.	Nalo Tantan	1.120	11.322
10.	Pamenang	2.761	24.110
11.	Pamenang Barat	1.291	12.386
12.	Pamenang Selatan	820	7.375
13.	Pangkalan Jambu	606	5.213
14.	Renah Pamenang	983	10.298
15.	Renah Pembarap	1.252	9.554
16.	Sungai Manau	1.047	8.170
17.	TiangPumpung	362	3.683
18.	Tabir	3.208	23.819
19.	Tabir Barat	1.106	7.546
20.	Tabir Ilir	713	7.075
21.	Tabir Lintas	2.126	5.764
22.	Tabir Selatan	2.214	20.919
23.	Tabir Timur	745	5.798
24.	Tabir Ulu	745	6.451
	<b>Total</b>	<b>33.145</b>	<b>261.155</b>



Dari data di atas jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Merangin sebanyak 261.155 orang dan daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak adalah terdapat di Kecamatan Bangko yaitu sebanyak 32.989 orang dan pemilih pemulanya sebanyak 3.342 orang sedangkan jumlah DPT terkeci terdapat pada Kecamatan Pangkalan Jambu yaitu 5.213 orang dan pemilih pemulanya sebanyak 606 orang. Kecamatan Bangko dipilih dalam penelitian ini dikarenakan jumlah DPT dan jumlah pemilih pemulanya yang terbanyak dari sekian banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin. Banyaknya jumlah pemilih pemula dikecamatan bangko menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti di Kecamatan bangko.

Hal ini dibuktikan dengan data dari KPU tentang partisipasi pemilih di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dan banyak hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan pemilu Pilpres, salah satunya yaitu dengan mendata pemilih tetap (DPT). Daftar pemilih tetap di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin 2019**

<b>No.</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
1.	17-21	3.342
2.	22-26	4.147
3.	27-31	4.788
4.	32-36	3.649
5.	37-41	3.504

6.	$\geq 42$	13.554
	<b>Jumlah</b>	<b>32.989</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah daftar pemilih tetap terbanyak adalah pada usia  $\geq 42$  dengan jumlah 13.554 orang dan jumlah terkecil adalah pada usia 17-21 tahun dengan jumlah 3.342 orang. Berikut jumlah daftar pemilih pemula berdasarkan desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Bangko.

**Tabel 1.3 Daftar Pemilih Pemula Kecamatan Bangko  
Kabupaten Merangin Tahun 2019**

No	Desa	Jumlah Pemilih Pemula (17-21 Tahun)	%
1.	Dusun Bangko	812	24.35
2.	Kungkai	235	7.03
3.	Langling	147	4.40
4.	Dusun Mudo	64	1.91
5.	Pasar Atas Bangko	410	12.26
6.	Pasar Bangko	164	4.91
7.	Pematang Kandis	1129	33.77
8.	Sungai Kapas	379	11.37
	<b>Jumlah</b>	<b>3342</b>	<b>100.00</b>

Dari data tabel di atas terlihat bahwa pada setiap desa/kelurahan terdapat daftar pemilih tetap yang berumur 17-21 tahun, yang terbanyak adalah di Desa Pematang Kandis yaitu sebanyak 1129 daftar pemilih tetap atau 33.77% dan yang paling sedikit adalah Dusun Mudo yaitu sebesar 64 daftar pemilih tetap atau 1.91%.

Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi politik dapat mensosialisasikan politik kepada pemilih pemula di Kecamatan Bangko yang pengetahuan politiknya masih sangat minim. Jadi peran keluarga sangatlah penting, karena minimnya pemahaman politik yang dilakukan oleh keluarga akan berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula.

Berdasarkan latar belakang dan data tabel maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KORELASI PARTISIPASI AKTIF POLITIK ORANG TUA TERHADAP PILIHAN PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah “Bagaimana korelasi partisipasi aktif politik orang tua terhadap pilihanpemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana korelasi partisipasi aktif politik orang tua terhadap pilihan pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu sosial pada umumnya, khususnya dalam bidang politik sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi terhadap penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi masyarakat akan menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya memberikan nilai-nilai politik kepada pemilih pemula.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten dapat memberi gambaran tentang proses pemberian dan penyerapan nilai-nilai politik dari agen-agen sosialisasi politik terhadap pemilih pemula.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas.

Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelebagaan kebebasan yang panjang dan berliku. Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar abad ke- V Sebelum Masehi (SM). Demokrasi atau demokratia merupakan suatu ungkapan yang terdiri dari kata demos sinonim kata populous yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan atau wewenang. Olehnya itu demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat<sup>10</sup>.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga

---

<sup>10</sup>Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: *Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008,

negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin- pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi<sup>11</sup>

Menurut Robert A.Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasardemokrasi. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*soverignty*) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah<sup>12</sup>. Pemahaman demokrasi ini telah dipahami secara universal dimana demokrasi tidak lagi dipahami dari segi substantifnya saja dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme penyampaian hak-hak tersebut.

### **1.5.2 Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang

---

<sup>11</sup> George Serensen. “*Demokrasi dan Demokratisasi*”.(Yogyakarta : PustakaPelajar.2003) Hlm 56

<sup>12</sup> Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: *Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*”,Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.

diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu “Memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu”.

Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat dimungkinkan berjalan secara ajeg. Pada pemilu pula, rakyat pemilih akan bisa menilai, para kontestan

pemilu dapat menawarkan visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tetapi tidak semua pemilihan adalah demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah. Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai



dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*)”.

### **1.5.3 Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum**

#### **1. Tujuan Pemilu Pemilihan Umum**

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## 2. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

### **1.5.4 Perbandingan Model Pemilihan Umum**

#### 1. Model Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan yang kelima akan terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

## 2. Model Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden. pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan.

Daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/ Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Pasangan calon wajib mempunyai rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU. Dan sumbangan dana kampanye dari

perorangan tidak boleh melebihi Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pemungutan suara di bagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu : Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Nomor urut pasangan calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian. Dan untuk bagian kedua Pungutan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden.

### 3. Model Pemilihan Umum Kepala Daerah

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP)

No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan.

### **1.5.5 Korelasi**

Korelasi merupakan suatu hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan antara variabel tersebut bisa secara korelasional dan bisa juga secara kasual. Jika hubungan tersebut tidak menunjukkan sifat sebab akibat, maka korelasi tersebut dikatakan korelasional artinya sifat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya tidak jelas mana variabel sebab mana variabel akibat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut menunjukkan sebab akibat, maka korelasinya

dikatakan kasual artinya jika variabel yang satu merupakan sebab maka variabel lainnya merupakan akibat.

Analisis korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan linear antara dua variabel atau lebih yang diskala secara interval. Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi dan korelasi sempurna. Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel yaitu apabila variabel yang satu (x) meningkat atau menurun maka variabel lainnya (y) cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel yaitu apabila variabel (x) meningkat atau menurun maka variabel lainnya (y) cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel (x) dan (y) tidak menunjukkan adanya hubungan. Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel (x) berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya (y).

### **1.5.6 Partisipasi**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan<sup>13</sup>. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau

---

<sup>13</sup>John M. Echols & Hasan Shadily “*Kamus indonesia inggris*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2000) Hlm 45

materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan<sup>14</sup>. Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya<sup>15</sup>.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiya<sup>16</sup> mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti

---

<sup>14</sup>I Nyoman Sumaryadi " *Sosiologi Pemerintahan* " (Jakarta : TB.Rahma Solo 2010) Hlm 82

<sup>15</sup>H.A.R.Tilaar " *Kekuasaan dan Pendidikan* " ( Jakarta : Gramedia Pustaka. 2009) Hlm 46

<sup>16</sup>Sugiyah " *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* " (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) Hlm 112

Irene Astuti D<sup>17</sup> membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi

### **1.5.7 Pemilih Pemula**

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.<sup>18</sup> Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
3. Terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian).
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
6. Terdaftar di DPT.

---

<sup>17</sup>Siti Irene Astuti D “*Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) Hlm 141

<sup>18</sup> Pahmi Sy, “*Politik Pencitraan*” (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010” Hlm 87



7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan akan dapat merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik.

Sosialisasi politik merupakan bagian dari kajian politik dalam pengertian proses. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik senantiasa berkaitan dengan segenap proses politik dalam kehidupan. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Menurut William J. Goode, "sosialisasi merupakan proses yang

harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok dengan kedudukannya di situ<sup>19</sup>.

Proses penyerapan nilai-nilai politik dalam diri setiap individu terjadi melalui berbagai perantara. Perantara proses penyerapan nilai-nilai politik itu dinamakan agen sosialisasi politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, agen sosialisasi politik meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya atau teman sejawat (*peer group*), media massa, dan organisasi yang ada dalam masyarakat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan bahwa agen sosialisasi politik merupakan perantara penyerapan nilai-nilai politik kepada seseorang, berikut ini adalah agen-agen sosialisasi politik.

#### a. Keluarga

Anak yang baru lahir (bayi) mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah didalam keluarga. Dari sinilah anak pertama mengenal lingkungan sosial dan budayanya, juga mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri<sup>20</sup>. Keluarga merupakan agen sosialisasi politik yang sangat potensial untuk mempengaruhi setiap individu. Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu. Dikatakan sebagai lingkungan yang pertama karena individu semenjak lahir dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dan sebelum berkenalan dengan berbagai nilai dalam

---

<sup>19</sup>William J. Goode. *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm 20

<sup>20</sup>Narwoko & Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana,2007) hlm 92.

masyarakat, individu yang bersangkutan telah mengenal nilai-nilai dalam keluarga.

Persoalan sosialisasi politik di Indonesia dalam kaitan dengan keberadaan keluarga adalah bahwa sebagian besar keluarga di Indonesia kondisi sosial ekonominya masih minim, sehingga mereka harus mencurahkan perhatian utamanya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian maka perhatian terhadap kehidupan politik masih sangat kurang, bahkan cenderung apatis terhadap kehidupan politik. Sosialisasi politik yang diperoleh seorang anak dapat terjadi karena hal yang tidak sengaja. Pernyataan secara tidak sengaja mengenai politik dari orang tua yang didengar seorang anak memungkinkan adanya ketertarikan seorang anak terhadap politik sehingga mampu mempengaruhi sikap politiknya.

Menurut teori interaksi simbolik kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik kepada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Berdasarkan teori interaksi simbolik dari George H Mead bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna dari nilai simbol itu. Makna dari simbol-simbol itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga, mempunyai posisi dan peran penting dalam menanamkan kesadaran politik pada pemilih pemula. Melalui interaksi yang dijalin antara orang tua kepada anaknya, menyebabkan tindakan tindakan yang menimbulkan suatu

stimulus-respon, yang nantinya dapat menumbuhkan suatu makna dari nilai simbolik atau tindakan-tindakan yang dilakukan orang tua<sup>21</sup>.

Ada beberapa indikator yang dapat dilakukan orang tua kepada anak atau pemilih pemula yaitu :

1. Memberikan pengetahuan politik pada pemilih pemula.
2. melakukan diskusi yang berkaitan dengan politik dengan pemilih pemula.
3. memberikan dukungan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik<sup>22</sup>.

Berdasarkan indikator mengenai memberikan pengetahuan politik pada pemilih pemula, peran orang tua yaitu memberikan wawasan politik dan pengetahuan politik dari berbagai media. Berbicara masalah memberikan pengertian politik pada pemilih pemula , orang tua mempunyai waktu yang cukup untuk berkumpul dengan keluarga, serta mempunyai intensitas yang lebih dekat dengan remaja dalam memberikan pengetahuan yang orang tua dapat pada anaknya sebagai pemilih pemula.

Berdasarkan indikator mengenai melakukan diskusi yang berkaitan dengan politik dengan pemilih pemula, peran orang tua yaitu menciptakan diskusi tentang kegiatan politik yang akan diikuti pemilih pemula, bertukar pendapat, meminta tanggapan, mendiskusikan tentang partai politik yang diminati oleh pemilih pemula, dan mendiskusikan tentang calon pemimpin yang akan dipilih oleh

---

<sup>21</sup>Artur Asa Berger, *Tanda-Tanda Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004) hlm 14.

<sup>22</sup>Fitri Sulistiyaning Tyas, Harmanto, *Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Kesadaran Politik Pada Anaknya Sebagai Pemilih Pemula Di Kelurahan Tambarkejo Kecamatan Simokerto Surabaya Tahun 2014*, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 1 Nomor 3, Diakses pada 11 Februari 2020.

pemilih pemula. Berbicara tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula, orang tua dapat melakukan dengan meminta tanggapan dari pemilih pemula terhadap situasi politik saat ini melalui berbagai media, yaitu media elektronik maupun media cetak sebagai salah satu upaya menanamkan kesadaran politik.

Berdasarkan indikator mengenai memberikan dukungan pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, peran orang tua yaitu dengan Mendukung untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan suara, memberikan kebebasan untuk memilih partai politik, mendukung pemilih pemula untuk menghadiri kegiatan politik, ikut dalam kegiatan kampanye, memberikan dukungan untuk aktif menjadi panitia saat ada pemilihan umum, dan mengikuti organisasi yang berarah pada pendidikan politik.

Keluarga memiliki peran penting dalam sosialisasi politik karena ada dua alasan, yakni sebagai berikut.

1. Hubungan yang terjadi di keluarga merupakan hubungan antar individu yang paling dekat dan memiliki ikatan yang erat sehingga efektif untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai.
  2. Keluarga merupakan lembaga yang pertama dan utama untuk menanamkan kepribadian anak sejak awal.
- b. Kelompok bermain atau teman sebaya

Didalam kelompok bermain individu mempelajari norma nilai, cultural, peran dan semua persyaratan lainnya yang dibutuhkan individu untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif didalam kelompok permainannya.

Singkatnya, kelompok bermain ikut menentukan dalam pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya<sup>23</sup>.

Kelompok bermain baik yang berasal dari kerabat, tetangga maupun teman sekolah, merupakan agen sosialisasi yang memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Didalam kelompok bermain, anak mempelajari berbagai kemampuan baru yang sering kali berbeda dengan apa yang mereka pelajari dari keluarganya.

c. Sekolah

Menurut Robert Dreeben mencatat beberapa hal yang dipelajari anak disekolah, selain membaca, menulis, dan berhitung adalah aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme dan spesifitas<sup>24</sup>. Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga dimana anak masih dapat mengharapkan bantuan dari orang tua dan seringkali memperoleh perlakuan khusus disekolah anak dituntut untuk bisa bersikap mandiri dan senantiasa memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dari teman-temannya. Di sekolah reward akan diberikan kepada anak yang terbukti mampu bersaing dan menunjukkan prestasi akademik yang baik. Di sekolah anak juga akan banyak belajar bahwa untuk mencapai prestasi yang baik, maka yang diperlukan adalah kerja keras.

d. Lingkungan kerja

Setelah seorang individu melewati masa kanak-kanak dan masa remaja, kemudian meninggalkan dunia kelompok permainannya, individu memasuki dunia baru, yaitu didalam lingkungan kerja. Pada umumnya individu yang ada

---

<sup>23</sup>Narwoko & Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007) hlm.94

<sup>24</sup>*Ibid* hlm.95

didalamnya sudah memasuki masa hampir dewasa bahkan sebagian besar adalah mereka sudah dewasa, maka sistem nilai dan norma lebih jelas dan tegas<sup>25</sup>.

Di dalam lingkungan kerja inilah individu saling saling berinteraksi dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku didalamnya. Seseorang yang bekerja di lingkungan birokrasi biasanya akan memiliki gaya hidup dan perilaku berbeda dengan orang lain yang bekerja diperusahaan swasta. Seseorang yang bekerja dan bergaul dengan teman-temannya ditempat kerja seperti dunia pendidikan tinggi, besar kemungkinan juga akan berbeda perilaku dan gaya hidupnya dengan orang lain yang berprofesi di dunia kemiliteran.

e. Media Massa

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam waktu yang sangat singkat, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga media massa, surat kabar, TV, film, radio, majalah, dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai- nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. disamping itu media massa juga menstransformasikan simbol-simbol atau lambang tertentu dalam suatu konteks emosional<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup>*Ibid* hlm 96

<sup>26</sup>*Ibid* hlm.92

Media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media massa ruang lingkungannya lebih luas dari media sosialisasi yang lainnya. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik<sup>27</sup>. Sosialisasi politik adalah proses memperkenalkan seseorang kepada suatu situasi lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan yang dapat ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menentukan suatu interaksi pengalaman serta kepribadianya<sup>28</sup>.

### **1.6 Hubungan Antar Variabel**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Devenden), yakni :

#### **1. Variabel bebas/independen (x)**

Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat/dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah keluarga.

---

<sup>27</sup>Raga Maran,R. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2001) hlm 245

<sup>28</sup>Michael Rush, dkk. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008) hlm 237



## 2. Variabel terikat/dependen (y)

Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas/independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pemilih pemula<sup>29</sup>.

Hubungan antara sosialisasi politik oleh keluarga dengan orientasi politik pemilih pemula saling berkaitan karena berjalannya suatu sistem politik membutuhkan pihak yang menjalankannya. Menurut teori Sunarto yaitu proses penyerapan nilai-nilai politik dalam diri setiap individu terjadi melalui berbagai perantara. Orang tua disini adalah sebagai perantara yang menjadi agen sosialisasi kepada pemilih pemula (anak)<sup>30</sup>.

### 1.7 Kerangka Konseptual

#### 1.7.1 Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta *kula* dan *warga* “kulawarga” yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* ( Bandung : Alfabeta, 2017 ) hlm 89.

<sup>30</sup> M. Teguh Wibowo, Effendi Hasan, *op.cit.*

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu<sup>31</sup>.

#### 1.7.2 Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah baru pertama atau pernah satu kali menggunakan hak pilihnya maka kurang memiliki pengalaman dalam melakukan pemungutan suara. Minimnya pengalaman ini karena wawasan politik yang terbatas. Pengetahuan politik yang rendah tersebut disebabkan pemilih pemula termasuk masa mengambang yaitu pemilih yang rentan dengan umur 17-21 tahun.

Pemilih pemula pada dasarnya memiliki ciri khas yaitu baru pertama memilih, kurang pengalaman, masih dikategorikan mengambang, kurang tertarik kehidupan politik serta mudah terpengaruh lingkungannya dan pemilih pemula sangat relative besar.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

1. Baru mengikuti pemilu (member suara) pertama kali sejak pemilu yang di selenggarakan di Indonesia yang rentan usia 17-21 tahun pemilih pemula ini biasanya berstatus pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda.

---

<sup>31</sup>Soejoono, Soekanto. *Sosiologi Keluarga*. ( Jakarta : Rineka Cipta, 2004 ) hlm 23

2. Warga Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu<sup>32</sup>

### 1.7.3 Sosialisasi Politik

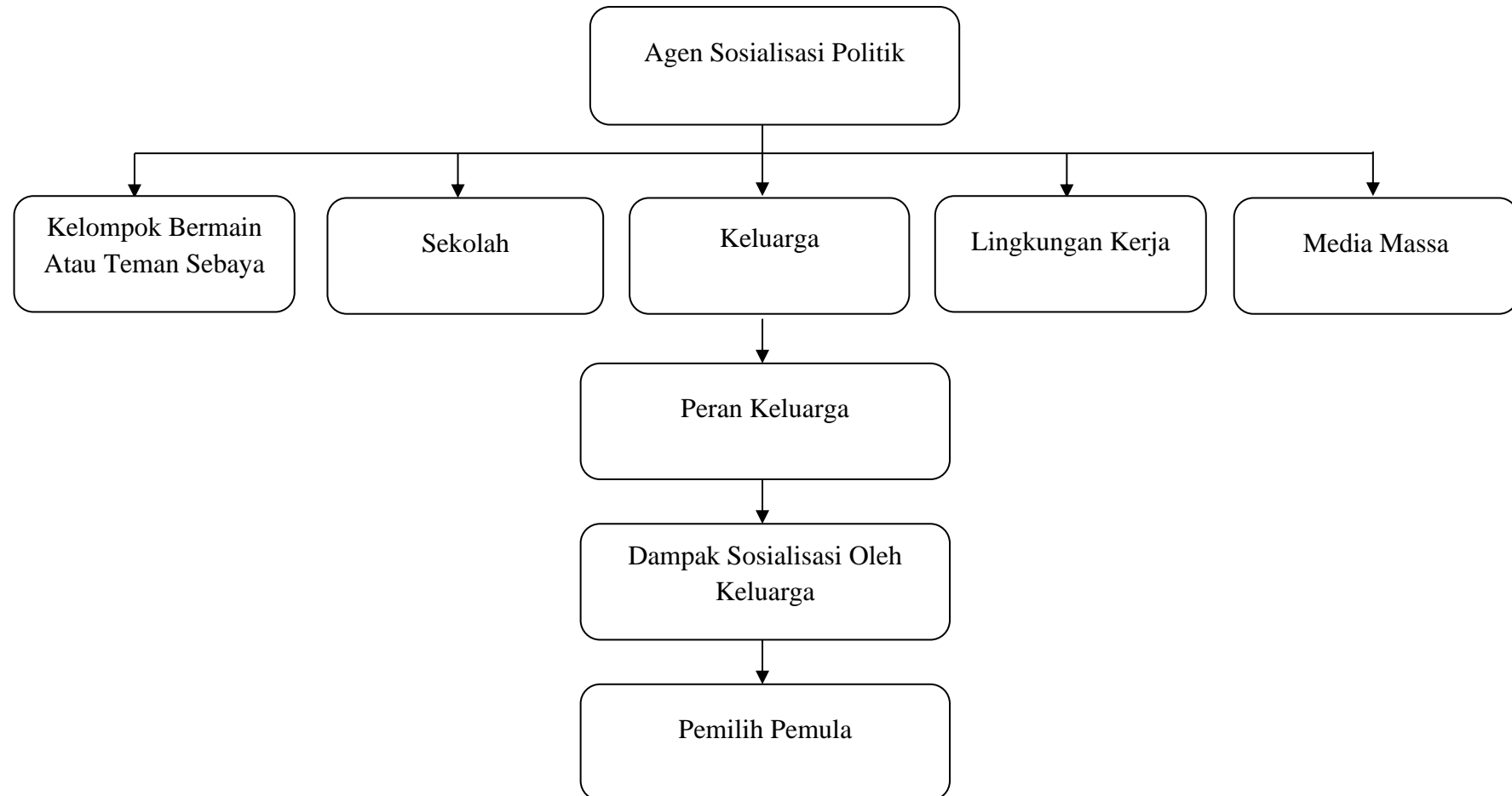
Pengertian sosialisasi politik secara sederhana dapat di pahami melalui menambahkan atau mengaitkan definisi yang ada tentang sosialisasi dengan politik, maka di dapatkan yaitu proses menanamkan informasi, ide, ideologi maupun kepentingan kepada orang lain baik melalui baik komunikasi langsung maupun tidak. Menurut Gabriel A. Almond Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. kebanyakan anak-anak, sejak masa kanak-kanaknya belajar memahami sikap dan harapan politik yang hidup dalam masyarakat<sup>33</sup>. Contoh sosialisasi politik dalam keluarga seperti orang tua mengenalkan semua institusi politik yang impersonal seperti MK (Mahkamah Agung), Partai politik dan Proses Pemilu kepada anak.

---

<sup>32</sup>Rudini, *Atas Nama Demokrasi*.( Jakarta: Bigraf Publishing, 2004), hlm 109.

<sup>33</sup>Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi* (Jakarta;Kencana ,2012) hlm 153.

### 1.8 Kerangka Fikir



## 1.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu teori yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan<sup>34</sup>.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Tidak ada korelasi orang tua terhadap perilaku pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

$H_1$  : Ada korelasi orang tua terhadap perilaku pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2019 di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

Hipotesis Statistik

$$H_0 : r_{xy} = 0$$

$$H_a : r_{xy} \neq 0$$

Dengan kriteria penarikan kesimpulan Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## 1.10 Metode Penelitian

### 1.10.1 Pendekata dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan survey untuk menggambarkan suatu variabel.

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* ( Bandung : Alfabeta, 2017 ) hlm 63

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif dengan maksimalisasi objektivitas desain penelitian dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol<sup>35</sup>.

### 1.10.2 Lokasi atau Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko yaitu sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin.

### 1.10.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>36</sup>.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 3342 orang.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan diambil dengan cara tertentu. Kriteria sampel adalah karakter umum subjek penelitian dari suatu populasi target atau terjangkau yang akan diteliti. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin  $n = N/(N(e)^2 + 1)$

$n$ : jumlah sampel       $N$ : jumlah populasi

$e$ : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

---

<sup>35</sup>*Ibid* hlm 72

<sup>36</sup>*Ibid* hlm 80.

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Penelitian dengan batas kesalahan 10% berarti memiliki tingkat akurasi 90%.<sup>37</sup>

**Tabel 1.4 Daftar Sampel Pemilih Pemula Kecamatan Bangko  
Kabupaten Merangin Tahun 2019**

No	Desa / Kelurahan	Populasi	$n = N/N(e)^2+1$	Sampel
1.	Dusun Bangko	812	$812 / 3342(0,1)^2+1$	24
2.	Kungkai	235	$235 / 3342(0,1)^2+1$	7
3.	Langling	147	$147 / 3342(0,1)^2+1$	5
4.	Dusun Mudo	64	$64 / 3342(0,1)^2+1$	2
5.	Pasar Atas Bangko	410	$410 / 3342(0,1)^2+1$	12
6.	Pasaar Bangko	164	$164 / 3342(0,1)^2+1$	5
7.	Pematang Kandis	1129	$1129 / 3342(0,1)^2+1$	33
8.	Sungai Kapas	379	$379 / 3342(0,1)^2+1$	11
	<b>Jumlah</b>	<b>3342</b>		<b>99</b>

Sumber : Data Diolah 2021.

---

<sup>37</sup>Ibid hlm 33

#### 1.10.4 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan peneliti sebagai sumber penelitian adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung menyebarkan kuesioner (lembar observasi) kepada responden untuk mengetahui secara jelas tentang pembahasan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berbentuk data dan laporan yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merangin . Data tersebut diambil untuk memperjelas permasalahan yang sedang diteliti, terhadap orientasi politik pemilih pemula<sup>38</sup>.

#### 1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang dilakukan secara terencana dan sistematis melalui pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati bagaimana pengaruh sosialisasi politik oleh keluarga terhadap perilaku politik pemilih pemula<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup>*Ibid* hlm 137

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 145



b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya<sup>40</sup>. Dalam penyusunan instrumen penelitian menggunakan model dari Rensis Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator dan sub indikator. Kemudian sub indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Adapun skala option dan pembobotan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

No	OPTION	SKOR/NILAI
1	Sangat tidak setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Setuju	3
4	Sangat setuju	4

---

<sup>40</sup>*Ibid* hlm 142

### 1.10.6 Teknik Analisa Data

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan<sup>41</sup>, pengertian metodologi penelitian sebagai berikut<sup>42</sup>: “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini ada dua, yaitu partisipasi aktif orang tua sebagai variabel bebas dan dilambangkan dengan X serta pemilih pemula sebagai variabel terikat dan dilambangkan dengan Y. Analisis regresi linier sederhana dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>41</sup>Sugiyono,2016

<sup>42</sup>*Ibid*

1. Sampel diambil secara random (acak)
2. Variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang kausal, dimana X merupakan sebab dan Y merupakan akibat.
3. Nilai Y mempunyai penyebaran yang berdistribusi normal.
4. Persamaan tersebut hendaknya benar-benar linier.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka analisis regresi linier sederhana tidak dapat dilanjutkan.

#### 1.10.6.1 Reliabilitas

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula *Alpha Cronbach*<sup>43</sup>, Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian.

Rumus *Alpha Cronbach*:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{(k-n)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right]$$

Keterangan

$r_{11}$  = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma^2 b$  = jumlah varian butir

$\sigma^2 t$  = varians total

Setelah diperoleh harga r hitung, selanjutnya untuk dapat dipastikan instrumen reliabel atau tidak, harga tersebut dikonsultasikan dengan harga r tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% maka dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk menginterpretasikan tingkat keterandalan dari instrumen digunakan pedoman sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto (2010:239),

Tabel Interpretasi nilai r

Besarnya r	Interpretasi
Antara 0.80 sampai dengan 1.00	Sangat kuat
Antara 0.60 sampai dengan 0.80	Kuat
Antara 0.40 sampai dengan 0.60	Cukup kuat
Antara 0.20 sampai dengan 0.40	Rendah
Antara 0.00 sampai dengan 0.20	Sangat rendah

### 1.10.6.2 Analisis Korelasi

Rumus korelasi product moment dari Karl Pearson dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara X dan Y

N = Jumlah subjek atau responden

$\sum X$  = Jumlah skor butir pertanyaan

$\sum x^2$  = Jumlah kuadrat skor butir pertanyaan

$\sum Y$  = Jumlah skor total pernyataan

$\sum Y^2$  = Jumlah kuadrat skor total pernyataan

$\sum XY$  = Jumlah perkalian X dan Y

Mengingat dengan korelasi product moment ini masih ada pengaruh kotor dari butir soal maka perlu dilakukan korelasi untuk menghilangkan pengaruh itu. Adapun koreksinya dengan menggunakan *part whole correlation* dengan rumus sebagai berikut

$$r_{bt} = \frac{(r_{xy})(Sb_y) - (Sb_x)}{\sqrt{\{(V_y + V_x) - 2(r_{xy})(Sb_y)(Sb_x)\}}}$$

Keterangan :

- $r_{bt}$  = Part Whole Correlation  
 $r_{xy}$  = Korelasi momen tangkar  
 $Sb_y$  = Simpanan baku total  
 $Sb_x$  = Simpanan baku bagian  
 $V_x$  = Varian total  
 $V_y$  = Varian bagian

Kriteria pengujian suatu butir dikatakan valid apabila koefisien korelasi  $r_{xy}$  berharga positif dan sama atau lebih besar dari  $r$  tabel dengan taraf signifikan 5 %. Jika koefisien korelasi lebih kecil dari harga tabel dengan taraf signifikan 5 % maka korelasi tidak signifikan.

### 1.10.6.3 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kenormalan data apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti merupakan variabel yang berdistribusi normal. Untuk menguji kenormalan data peneliti menggunakan uji kolmogorovsmirnov. Dan pengujiannya adalah sebagai berikut<sup>44</sup>

- a) Untuk melakukan uji ini perlu dilakukan beberapa perhitungan dasar, yaitu rata-rata skor dan standar deviasi dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: f(x) = \text{normal}$$

$$H_1: f(x) \neq \text{normal}$$

---

<sup>44</sup> Agus Irianto, Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.17

- b) Data disusun terlebih dahulu dari yang terkecil dengan diikuti frekuensi masing-masing dan frekuensi kumulatifnya.
- c) Menghitung Standar deviasi yang diperoleh dengan rumus:

$$Sd^2 = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$Sd = \sqrt{Sd^2}$$

Dengan

X = Nilai masing-masing skor

$\bar{X}$  = rata-rata nilai

- d) Menghitung nilai Z skor dari masing-masing skor dengan rumus:

$$Z_{skor} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$\mu$  = rata-rata populasi

$\sigma$  = simpangan baku

- e) Menghitung nilai  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  yang diperoleh dari :

$$\alpha_2 = \frac{F}{n} - p \leq Z$$

$$\alpha_1 = \frac{F}{n} - \alpha_2$$

Dengan  $\alpha_1$  dan  $\alpha_2$  adalah kesalahan

- f) Membandingkan nilai  $\alpha_1$  dengan D table, dengan kriteria:

Terima  $H_0$  jika  $\alpha_1$  maksimum  $\leq$  D tabel

Tolak  $H_0$  jika  $\alpha_1$  maksimum  $>$  D table

#### 1.10.6.4 Analisis Regresi

Teknik analisa merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Regression Analysis* dan *Partial Corelation*. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh antar variabel, apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh itu, adapun analisa data dalam penelitian ini menggunakan ketentuan sebagaiberikut:

Rumus persamaan garis regresi prediktor

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Kriteriaum

a = Bilangan Konstan

b = Koefisien Prediktor

X =Prediktor

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi aktif politik orang tua terhadap pilihan pemilih pemula, maka digunakan teknik bantuan SPSS.